

Katalog BPS : 9302020.3503



Sensus  
Penduduk  
2020



# PDRB

**Produk Domestik Regional Bruto**

**KABUPATEN TRENGGALEK**

**MENURUT PENGELUARAN**

**2015 - 2019**



*Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek*

Katalog BPS : 9302020.3503



Sensus  
Penduduk  
2020



**PDRB**

**Produk Domestik Regional Bruto  
KABUPATEN TRENGGALEK  
MENURUT PENGELUARAN  
2015 - 2019**



*Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek*

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)  
KABUPATEN TRENGGALEK  
MENURUT PENGELUARAN  
2015 – 2019**

Katalog BPS : 9302020.3503  
Nomor Publikasi : 35030.2004  
Ukuran Buku : A4 (21cm x 29,7 cm)  
Jumlah Halaman : v + 60  
Naskah : Seksi Neraca Wilayah Dan Analisis Statistik  
Diterbitkan Oleh : BPS Kabupaten Trenggalek

*Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya*

<https://trenggalek.kab.bps.go.id>

## **TIM PENYUSUN**

### **Penanggungjawab Umum**

Joko Santoso

### **Penyunting**

Imam Rochani

### **Penulis**

Imam Rochani

### **Pengolah Data**

Imam Rochani

### **Gambar Kulit**

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

<https://trenggalek.kab.bps.go.id>

## KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi.

Publikasi “Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Trenggalek Menurut Pengeluaran 2015 - 2019” ini merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Trenggalek, menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Trenggalek secara deskriptif.

Dalam publikasi ini disajikan tabel-tabel PDRB tahun 2015 – 2019 atas dasar harga berlaku (*adhb*) dan atas dasar harga konstan (*adhk*) 2010 dalam nilai nominal dan persentase yang merupakan implementasi *System of National Accounts* (SNA) 2008 dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2014 revisi IV. Sebagai pelengkap ulasan tabel-tabel tersebut, disajikan pula konsep, definisi, ruang lingkup dan metode penghitungan PDRB menurut pengeluaran.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan publikasi ini, disampaikan terima kasih. Saran perbaikan selalu diharapkan untuk penyempurnaan publikasi ini dimasa mendatang. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua.

Trenggalek, Mei 2019

**Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek**

Kepala



Joko Santoso

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
Kata Pengantar	III
Daftar Isi	IV
Bab I. Pendahuluan	1
1.1    Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2
1.2    Perubahan Tahun Dasar PDRB	5
Bab II. Metoda Estimasi Dan Sumber Data	10
2.1    Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT)	11
2.2    Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT)	13
2.3    Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)	15
2.4    Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	17
2.5    Perubahan Inventori (PI)	20
2.6    Ekspor – Impor	22
Bab III. Tinjauan Perekonomian Kabupaten Trenggalek Menurut PDRB Pengeluaran 2015 -2019	24
3.1    Perkembangan PDRB Pengeluaran	25
3.2    Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran	33
BAB IV. Perkembangan Agregat Pdrb Pengeluaran Kabupaten Trenggalek	46
4.1    PDRB (NOMINAL)	47
4.2    Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	48
4.3    Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	49
BAB V. Penutup	51
Lampiran	53
Daftar Pustaka	59



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

<https://tremgalekkaabps.go.id>

## 1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)<sup>1</sup>. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep<sup>2</sup> penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda seperti yang disampaikan di atas dimaksudkan untuk:

- i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi;

---

<sup>1</sup> Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

<sup>2</sup> *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

- ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan
- iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*).

Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian, PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para

pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat<sup>3</sup>, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Dimana:

Y (Income)	= PDRB Produksi
C (Consumption)	= Konsumsi akhir
GFCF (Gross Fixed Capital Formation)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
$\Delta$ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta  $\Delta$  Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

---

3. - Yang dimaksud adalah rumahtangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik  
- Disebut sebagai pendekatan “riil”  
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

## 1.2. Perubahan Tahun Dasar PDRB

### Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB/PDRB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan

PDB/PDRB, maka perubahan tahun dasar PDB/PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB/PDRB.

### **Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?**

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

### **Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?**

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

### **Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?**

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

## Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun<sup>4</sup>;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

## Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
  - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
  - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.

---

<sup>4</sup> SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
  - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
  - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
  - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
  - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
  - h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). *FISIM* dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

### Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
4. Perubahan Inventori	5. Perubahan Inventori
5. Ekspor	6. Ekspor
6. Impor	7. Impor

**BAB II**  
**METODE ESTIMASI**  
**DAN**  
**SUMBER DATA**

<https://trenggalek.kab.bps.go.id>

## 2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)

### i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran<sup>5</sup>. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

### ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah Tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya makanan dan perumahan.

### iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan

---

<sup>5</sup> Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

**iv. Sumber Data**

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

**v. Metoda Estimasi**

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku)
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

## 2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)

### i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

### ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

### iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain

- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

**iv. Sumber Data**

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

**v. Metoda Estimasi**

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

## 2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)

### i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

### ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni

yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

### iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

### iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

### v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\begin{aligned} \text{PK-P adhb} &= \text{Output} - \text{Penjualan barang dan jasa} \\ &+ \text{Social transfer in kind purchased market production} \\ &+ \text{Output Bank Indonesia} \end{aligned}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan *men-deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

## 2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

### i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

## ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

## iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

## iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS

- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

**v Metoda estimasi**

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

❖ Metoda Langsung:

PMTB adhb (Domestik) =

Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB adhb (Impor) =

Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB adhk diperoleh dengan cara men-deflate PMTB adhb dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

❖ Metoda Tidak Langsung:

- Pendekatan Supply :

PMTB adhb = Total Supply Barang x Rasio PMTB

- Pendekatan Ekstrapolasi :

PMTB adhk (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

## 2.5. Perubahan Inventori (PI)

### i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

### ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu,

minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

### iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk sama seperti waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

### iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen ini adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia;
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalan BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;

6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

#### v **Metoda Estimasi**

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

##### a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

$$PI\ adhb = (\text{Volume inventori } (t) - \text{Volume inventori } (t-1)) \times \text{Harga per unit}$$

$$PI\ adhk = PI\ \text{atas dasar harga Berlaku} / IHPB$$

##### b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$PI\ adhk = \text{Inventori } (t)\ \text{atas dasar harga Berlaku/IHPB } (t) \\ - \text{Inventori } (t-1)\ \text{atas dasar harga Berlaku/IHPB } (t-1)$$

$$PI\ adhb = PI\ \text{atas dasar harga Konstan} \times IHPB\ \text{rata-rata } (t)$$

## 2.6. Ekspor - Impor

### i **Pendahuluan**

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang

memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

## **ii Konsep dan definisi**

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

## **iii Cakupan**

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai *Net Ekspor*.

## **iv Sumber Data**

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan metoda tidak langsung.

## **BAB III**

# **TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN TRENGGALEK MENURUT PDRB PENGELUARAN 2015 -2019**

### 3.1. Perkembangan PDRB Pengeluaran

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015 PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kabupaten Trenggalek atas dasar harga berlaku di tahun 2019 meningkat sebesar 6,91 persen, yakni dari 17,35 trilyun rupiah (2010=100) di tahun 2018 menjadi 18,55 trilyun rupiah (2010=100) di tahun 2019. Jika dinilai atas dasar harga konstan 2010, maka peningkatan ini relatif lebih kecil, yakni dari 12,16 trilyun rupiah (2010=100) di tahun 2018 menjadi 12,78 trilyun rupiah (2010=100) di tahun 2019, atau meningkat sebesar 5,08 persen. Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kabupaten Trenggalek periode 2015 - 2019 dapat tetap tumbuh di atas 5 persen, yakni dari sebesar 5,03 persen tahun 2018 hingga mencapai 5,08 persen tahun 2019. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*).

Tabel 1.  
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,  
2015 – 2019 (Milyar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	9.675,7	10.509,6	11.311,8	12.309,6	13.286,0
2. Konsumsi LNPRT	558,1	618,7	653,7	719,2	753,9
3. Konsumsi Pemerintah	1.713,7	1.663,5	1.777,9	1.968,6	2.122,6
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.572,6	2.880,2	3.153,0	3.439,8	3.699,4
5. Perubahan Inventori	25,6	16,5	16,7	18,5	19,0
6. Net Ekspor	-910,8	-772,8	-831,4	-1.101,1	-1.327,8
PDRB	13.634,8	14.915,8	16.081,7	17.354,5	18.553,2

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Keterangan : \* Angka Diperbaiki

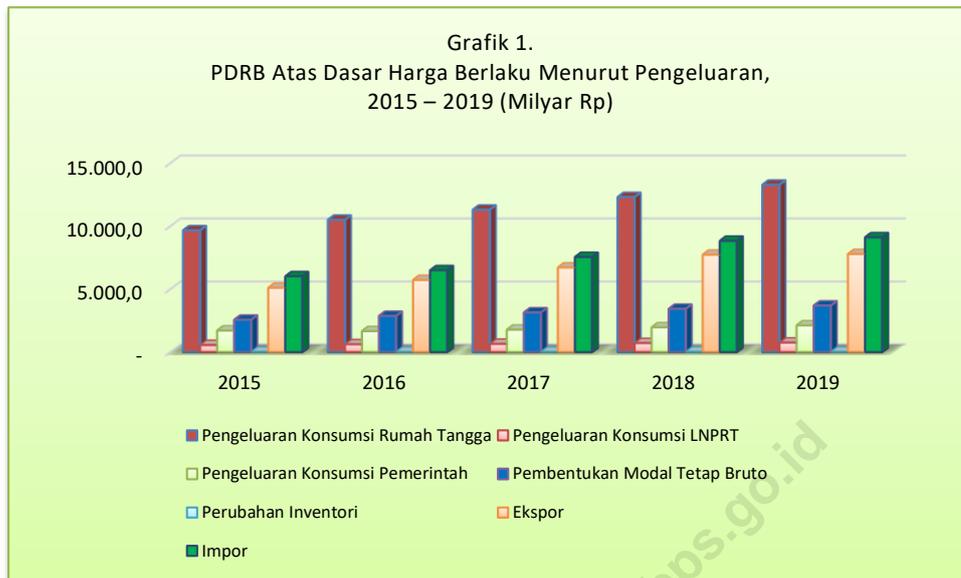
\*\* Angka Sementara

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 9,91 persen. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. 13 lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar 5 hingga di atas 8 persen. Sedangkan 4 lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari 5 persen. 13 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 5 hingga di atas 8 persen tersebut antara lain: lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 9,29 persen; Konstruksi sebesar 6,37 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,94 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,91 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,46 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,72 persen; Real Estat sebesar 6,09 persen; Jasa Perusahaan sebesar 7,01 persen; Jasa Pendidikan sebesar 7,53 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,43 persen; dan lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 6,65 persen. Sedangkan 4 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan kurang dari 5 persen adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,48 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,32 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,76 persen; dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,95 persen.

Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek didominasi pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), meskipun kontribusinya bukan yang terbesar dari total PDRB tahun 2019. Komponen PMTB tumbuh di atas 4 persen tepatnya sebesar 4,88 persen dengan kontribusi 19,94 persen dari perekonomian Trenggalek. Berikutnya adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 4,78 persen (kontribusi 71,61 persen). Sementara itu komponen Ekspor yang mempunyai kontribusi sebesar 42,02 persen hanya tumbuh kurang dari 3 persen, tepatnya sebesar 2,30 persen.

Pada periode tahun 2015 - 2019 PDRB Kabupaten Trenggalek atas dasar harga berlaku (adhb) meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 13,63 trilyun rupiah (2015); 14,91 trilyun rupiah (2016); 16,08 trilyun rupiah (2017) dan 17,35 trilyun rupiah (2018) serta 18,55 trilyun rupiah (2019). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen

pengeluaran Kabupaten Trenggalek pada periode 2015-2019 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1.



Bila ditinjau dari komponen pembentuk PDRB Pengeluaran atas dasar harga berlaku dalam periode 2015 – 2019, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar dengan membentuk 9,67 trilyun rupiah pada tahun 2015 hingga mencapai 13,28 trilyun rupiah pada tahun 2019. Berikutnya adalah komponen Impor sebesar 6,02 trilyun rupiah tahun 2015 dan berkembang menjadi 9,12 trilyun rupiah tahun 2019. Komponen Ekspor merupakan komponen terbesar ketiga dengan 5,11 trilyun rupiah (2015); 5,73 trilyun rupiah (2016); 6,73 trilyun rupiah (2017); dan 7,73 trilyun rupiah (2018) serta 7,79 trilyun rupiah (2019). Komponen terbesar keempat adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Komponen ini memberikan share sebesar 2,57 trilyun rupiah tahun 2015 hingga menjadi 3,69 trilyun rupiah tahun 2019. Sementara itu, komponen Perubahan Inventori merupakan komponen penyumbang terkecil dalam PDRB Pengeluaran dengan 18,49 milyar rupiah tahun 2018 dan 19,04 trilyun milyar tahun 2019.

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan

2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Trenggalek pada periode 2015 - 2019 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2.



**Tabel 2.**  
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,  
2015 – 2019 (Milyar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	7.652,2	7.988,2	8.352,9	8.753,5	9.171,7
2. Konsumsi LNPRT	384,6	407,4	417,5	445,7	456,2
3. Konsumsi Pemerintah	1.164,4	1.065,4	1.090,5	1.143,4	1.195,6
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.040,2	2.164,1	2.296,0	2.434,0	2.552,7
5. Perubahan Inventori	17,0	10,0	10,1	10,2	10,3
6. Net Ekspor	-756,8	-608,6	-587,2	-624,9	-607,0
<b>PDRB</b>	<b>10.501,6</b>	<b>11.026,5</b>	<b>11.579,9</b>	<b>12.161,9</b>	<b>12.779,5</b>

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek  
Keterangan : \* Angka Diperbaiki  
\*\* Angka Sementara

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Trenggalek meningkat, yakni sebesar 10,50 trilyun rupiah (2015); 11,02 trilyun rupiah (2016) serta 11,57 trilyun rupiah (2017) dan 12,16 trilyun rupiah (2018) serta 12,77 trilyun rupiah

(2019). Ditinjau dari PDRB atas dasar harga konstan pula, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek yang sebelumnya cenderung melambat 4 tahun sebelumnya, namun tahun 2018 kembali menunjukkan geliatnya dan tumbuh 5,03 persen. Sedangkan tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,05 persen poin menjadi 5,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Bila ditinjau dari komponen pembentuk PDRB Pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 (2010=100) dalam periode 2015 – 2019, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar dengan membentuk 7,65 trilyun rupiah pada tahun 2015 hingga mencapai 9,17 trilyun rupiah pada tahun 2019. Berikutnya adalah komponen Impor sebesar 4,64 trilyun rupiah tahun 2015 dan meningkat menjadi 5,91 trilyun rupiah tahun 2019. Komponen Ekspor merupakan komponen terbesar ketiga dengan 3,89 trilyun rupiah (2015); 4,29 trilyun rupiah (2016); 4,75 trilyun rupiah (2017); dan 5,18 trilyun rupiah (2018) serta 5,30 trilyun rupiah (2019). Komponen terbesar keempat adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Komponen ini memberikan share sebesar 2,04 trilyun rupiah tahun 2015 hingga menjadi 2,55 trilyun rupiah tahun 2019. Sementara itu, komponen Perubahan Inventori merupakan komponen penyumbang terkecil dalam PDRB Pengeluaran dengan 16,98 milyar rupiah tahun 2015 dan 10,31 milyar rupiah tahun 2019.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan. Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Tabel 3.  
Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran  
Kabupaten Trenggalek, 2015 – 2019 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	70,96	70,46	70,34	70,93	71,61
2. Konsumsi LNPRT	4,09	4,15	4,06	4,14	4,06
3. Konsumsi Pemerintah	12,57	11,15	11,06	11,34	11,44
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	18,87	19,31	19,61	19,82	19,94
5. Perubahan Inventori	0,19	0,11	0,10	0,11	0,10
6. Net Ekspor	-6,68	-5,18	-5,17	-6,34	-7,16
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

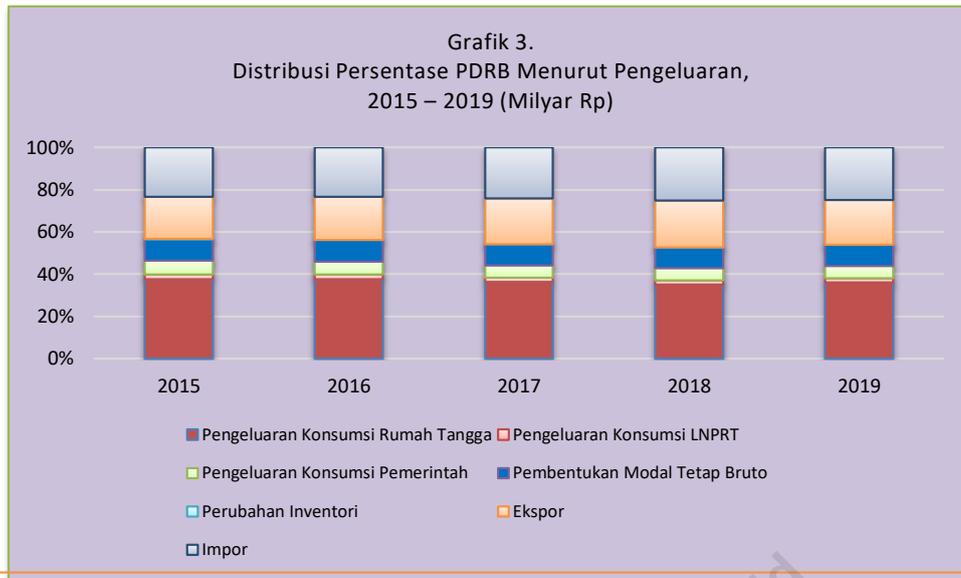
Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Keterangan : \* Angka Diperbaiki

\*\* Angka Sementara

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2015-2019, PDRB Kabupaten Trenggalek sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), dengan kontribusi diatas 70 persen. Pengeluaran untuk akitvitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 19 persen. Meskipun komponen ekspor berkontribusi sekitar 37 s.d 42 persen, namun di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 43 s.d 50 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 11 – 13 persen. Pada tahun 2015, kontribusi PK-P sebesar 12,57 persen. Kontribusinya berfluktuasi dalam empat tahun berikutnya, hingga hanya mencapai 11,44 persen pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Pada perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan impor yang cenderung lebih tinggi dari ekspor. Kecenderungan pada periode itu menunjukkan posisi “defisit” atau merugi, dimana nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai impor.



Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2015 - 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek mengalami perlambatan sampai tahun 2016, yakni sebesar 5,03 persen (2015); 5,00 persen (2016), namun kembali meningkat pada tahun 2017 sebesar 5,02 persen dan 2018 sebesar 5,03 persen dan sebesar 5,08 persen pada tahun 2019. Dari tabel 4 juga terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

Komponen ekspor merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan paling pesat pada tahun 2017 yaitu tumbuh sebesar 10,86 persen, meskipun dalam 2 tahun sebelumnya sempat mengalami kontraksi. Namun pada tahun 2019 komponen ini mengalami perlambatan hingga mencapai 2,30 persen tahun 2019. Sedangkan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) meskipun memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian Trenggalek, namun tumbuh kurang dari 5 persen pada 4 tahun terakhir mulai tahun 2015 hingga 2019.

Tabel 4.  
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Trenggalek,  
2015 – 2019 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,23	4,39	4,57	4,80	4,78
2. Konsumsi LNPRT	0,12	5,94	2,49	6,75	2,34
3. Konsumsi Pemerintah	1,60	-8,50	2,36	4,85	4,56
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,98	6,07	6,10	6,01	4,88
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	5,03	5,00	5,02	5,03	5,08

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Keterangan : \* Angka Diperbaiki

\*\* Angka Sementara

Indeks implisit<sup>6</sup> PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2015 – 2019, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Indeks Implisit Trenggalek tahun 2015 sebesar 129,84 meningkat menjadi 145,18 pada tahun 2019 atau dengan rata-rata sekitar 3,84 poin per tahun. Bila kita perhatikan komponennya, implisit tertinggi adalah komponen Perubahan Inventori dengan implisit sebesar 184,66. Hal ini menunjukkan, bahwa perubahan harga pada komponen perubahan inventori lebih tinggi dari pada perubahan harga pada PDRB secara total.

<sup>6</sup> Indeks perkembangan

Tabel 5.  
Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Trenggalek  
2015 - 2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	126,44	131,56	135,42	140,62	144,86
2. Konsumsi LNPRT	145,11	151,87	156,55	161,36	165,28
3. Konsumsi Pemerintah	147,17	156,13	163,03	172,17	177,54
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	126,10	133,09	137,33	141,32	144,92
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	129,84	135,27	138,88	142,70	145,18

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Keterangan : \* Angka Diperbaiki

\*\* Angka Sementara

## 3.2. Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Trenggalek untuk periode 2015 – 2019.

### 3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Trenggalek ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Trenggalek maupun produk (impor) yang didatangkan dari

luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 12 (dua belas) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok Makanan dan minuman tidak beralkohol; Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik; Pakaian dan alat kaki; Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya; Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin; Kesehatan; Angkutan; Komunikasi; Rekreasi/hiburan dan kebudayaan; Pendidikan; Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Tabel 6.  
Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Trenggalek,  
2015—2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	9.675,7	10.509,6	11.311,8	12.309,6	13.286,0
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	7.652,2	7.988,2	8.352,9	8.753,5	9.171,7
Proporsi terhadap PDRB ADHB	70,96	70,46	70,34	70,93	71,61
Rata-rata konsumsi per-Kapita (Juta Rp)					
a. ADHB	14,04	15,20	16,32	17,71	19,08
b. ADHK 2010	11,10	11,56	12,05	12,60	13,17
Pertumbuhan <sup>7</sup>					
a. Total konsumsi RT	3,23	4,39	4,57	4,80	4,78
b. Perkapita	2,87	4,07	4,29	4,52	4,57
Jumlah penduduk (orang)	689.200	691.295	693.104	694.902	696.295

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Keterangan : \* Angka Diperbaiki

\*\* Angka Sementara

Data diatas menunjukkan bahwa pada periode tahun 2015 – 2019 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah

<sup>7</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selama periode 2015 – 2019 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB berfluktuasi. Meskipun demikian kontribusinya masih sangat besar diatas 70 persen, yaitu 70,96 persen (2015); 70,46 persen (2016); 70,34 persen (2017) serta 70,93 persen (2018) dan 71,61 persen (2019). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 71,61 persen dan terendah pada tahun 2017 sebesar 70,34 persen.

Secara rata-rata, konsumsi per rumahtangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2015, setiap orang di Kabupaten Trenggalek menghabiskan dana sekitar 14,04 juta rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 15,20 juta rupiah (2016); 16,32 juta rupiah (2017); dan 17,71 juta rupiah (2018) serta 19,08 juta rupiah (2019). Sementara itu, atas dasar harga Konstan 2010, rata-rata konsumsi per rumahtangga tumbuh pada kisaran 3 sampai 5 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 4,80 persen.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” meningkat pada kisaran 2,87 s.d 4,57 persen. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumah tangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7.  
Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Trenggalek  
2015—2019<sup>8</sup> (Persen)

Kelompok Konsumsi	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan dan Minuman Non Berakohol	26,79	26,34	26,07	26,02	25,85
b. Minuman Berakohol dan Rokok	2,02	1,95	1,89	1,86	1,84
c. Pakaian	3,34	3,33	3,32	3,28	3,25
d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	4,22	4,31	4,33	4,30	4,25
e. Perabot, Peralatan Rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	4,52	4,52	4,49	4,45	4,41
f. Kesehatan	3,62	3,62	3,60	3,58	3,54
g. Transportasi/Angkutan	16,63	16,77	17,03	17,46	17,88
h. Komunikasi	2,88	2,99	3,04	3,05	3,03
i. Rekreasi dan Budaya	6,16	6,21	6,27	6,23	6,19
j. Pendidikan	4,93	4,99	5,02	4,99	4,93
k. Restoran dan Hotel	19,41	19,47	19,45	19,34	19,43
l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	5,49	5,51	5,50	5,44	5,39
<b>Total Konsumsi Rumah tangga</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Keterangan : \* Angka Diperbaiki  
\*\* Angka Sementara

Pada tahun 2015 pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga sebesar 3,23 persen. Kemudian, berturut-turut sebesar 4,39 persen (2016); dan 4,57 persen (2017) serta 4,80 persen (2018) dan 4,78 persen (2019). Sementara itu pertumbuhan konsumsi perkapita pada masing-masing tahun adalah 2,87 persen (2015); 4,07 persen (2016); 4,29 persen (2017) dan 4,52 persen (2018) serta 4,57 persen (2019). Dari data tersebut nampak bahwa peningkatan total konsumsi “riil” rumah tangga lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang berada pada kisaran 0,2 persen. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 8, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada periode lima tahun terakhir, peningkatan harga

<sup>8</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

relatif tinggi terjadi pada harga kelompok Minuman Beralkohol dan Rokok sebesar 9,20 (2016); dan kelompok Pendidikan sebesar 9,09 persen (2015). Tahun 2018 laju implisitnya konsumsi rumah tangga sebesar 3,77 dimana laju implisit terbesar adalah 5,77 persen pada harga subkomponen Pakaian; dan terendah sebesar 2,52 persen pada sub komponen Perabot, Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya.

Tabel 8.  
Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Trenggalek, 2015—2019<sup>9</sup> (Persen)

Kelompok Konsumsi	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan dan Minuman Non Berakohol	3,74	3,93	2,62	3,47	2,77
b. Minuman Berakohol dan Rokok	4,95	9,20	3,61	3,12	2,75
c. Pakaian	1,30	4,91	4,42	5,58	1,48
d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	2,00	1,82	2,66	2,52	1,86
e. Perabot, Peralatan Rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	2,51	4,21	2,28	3,57	2,22
f. Kesehatan	8,19	3,83	3,39	3,31	2,16
g. Transportasi/Angkutan	1,95	2,15	2,12	3,86	2,70
h. Komunikasi	1,97	3,15	2,33	3,57	2,72
i. Rekreasi dan Budaya	2,52	3,71	3,40	2,48	2,52
j. Pendidikan	9,09	4,17	5,09	4,44	2,93
k. Restoran dan Hotel	4,65	5,46	3,24	4,75	4,67
l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	2,79	5,21	3,06	4,83	2,90
Konsumsi Akhir Rumahtangga	3,72	4,05	2,93	3,84	3,01

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Keterangan : \* Angka Diperbaiki  
\*\* Angka Sementara

### 3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

<sup>9</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2015-2019 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2015 konsumsi LNPRT atas dasar harga berlaku sebesar 558,1 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 618,7 miliar rupiah (2016); 653,7 miliar rupiah (2017) dan 719,2 miliar rupiah (2018) serta 753,9 miliar rupiah (2019). Pada periode yang sama, kontribusinya terhadap total PDRB tidaklah besar, hanya sekitar 4 persen saja setiap tahunnya, dimana yang tertinggi sebesar 4,15 persen pada tahun 2016 dan terendah sebesar 4,06 persen tahun 2017.

Sementara itu, pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Berturut-turut pertumbuhannya adalah 0,12 persen (2015), 5,94 persen (2016) dan 2,49 persen (2017) serta 6,75 persen (2018) dan 2,34 persen (2019).

Tabel 10.  
Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Trenggalek  
2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	558,1	618,7	653,7	719,2	753,9
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	384,6	407,4	417,5	445,7	456,2
Proporsi terhadap PDRB ADHB	4,09	4,15	4,06	4,14	4,06
Pertumbuhan	0,12	5,94	2,49	6,75	2,34

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek  
Keterangan : \* Angka Diperbaiki  
\*\* Angka Sementara

### 3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah

- a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah.
- b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga).

c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.

Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri antara lain:

a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut.

b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, kecuali pada tahun 2016 yang terjadi penurunan. Pada tahun 2015 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 1,71 trilyun rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 1,66 trilyun rupiah (2016); 1,78 trilyun rupiah (2017); 1,97 trilyun rupiah (2018) dan 2,12 trilyun rupiah (2019). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami fluktuasi pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi fluktuasi pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB mengalami fluktuasi dari 12,57 persen (tahun 2015) hingga mencapai 11,44 persen (tahun 2019). Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 11,06 persen; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2015 yang sebesar 12,57 persen.

Tabel 11.  
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Trenggalek  
2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.713,7	1.663,5	1.777,9	1.968,6	2.122,6
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.164,4	1.065,4	1.090,5	1.143,4	1.195,6
Proporsi terhadap PDRB ADHB	12,57	11,15	11,06	11,34	11,44
Pertumbuhan <sup>10</sup>					
a. Total konsumsi Pemerintah	1,60	-8,50	2,36	4,85	4,56
b. Konsumsi Pemerintah Per Kapita	1,24	-8,78	2,09	4,58	4,35
Jumlah penduduk (orang)	689.200	691.295	693.104	694.902	696.295

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Keterangan : \* Angka Diperbaiki  
\*\* Angka Sementara

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan adanya fluktuasi, hal ini diikuti pula oleh adanya fluktuasi pada rata-rata konsumsi pemerintah perkapita. Pada tahun 2015 konsumsi pemerintah perkapita atas dasar harga berlaku sebesar 2,49 juta rupiah, berfluktuasi pada tahun-tahun setelah itu, yaitu menjadi 2,41 juta rupiah (2016); 2,57 juta rupiah (2017); 2,83 juta rupiah (2018) dan mencapai 3,05 juta rupiah pada tahun 2019.

Rata-rata konsumsi pemerintah perkapita atas dasar harga konstan 2010 juga fluktuatif setiap tahunnya, dengan masing-masing senilai 1,69 juta rupiah (2015) dan mencapai 1,72 juta rupiah tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,24 persen (2015) dan menjadi minus 8,78 persen (2016). Kemudian pada tahun berikutnya

<sup>10</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita yaitu 2,09 persen (2017); 4,58 persen (2018) dan 4,35 persen (2019).

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan peningkatan, baik secara keseluruhan maupun rata-rata perkapita. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan 2019 dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah masing-masing tahun sebesar 4,85 persen dan 4,56 persen; untuk konsumsi pemerintah perkapita 4,58 persen dan 4,35 persen.

#### **3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto**

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)<sup>11</sup>. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2015 – 2019 berfluktuasi dari 5,98 persen (2015) menjadi 6,10 persen (2017) yang merupakan pertumbuhan tertinggi, sementara di tahun lainnya masing-masing 6,07 persen (2016); dan 6,01 persen (2018) serta 4,88 persen (2019).

Proporsi PMTB terhadap PDRB dalam 5 tahun terakhir sekitar 18 – 19 persen, dimana terendah sebesar 18,87 persen tahun 2015 dan tertinggi sebesar 19,94 persen tahun 2019. Komponen PMTB dibentuk oleh sub komponen bangunan dan sub komponen non bangunan. Sub komponen bangunan membentuk lebih dari 80 persen PMTB sedangkan sisanya dibentuk oleh sub komponen non bangunan.

---

<sup>11</sup> Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

Tabel 12.  
Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Trenggalek  
2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	2.572,6	2.880,2	3.153,0	3.439,8	3.699,4
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.040,2	2.164,1	2.296,0	2.434,0	2.552,7
Proporsi terhadap PDRB ADHB	18,87	19,31	19,61	19,82	19,94
Struktur PMTB <sup>12</sup>					
a. Bangunan					
Milyar Rp	2.224,5	2.510,7	2.752,0	3.005,5	3.236,0
%	86,47	87,17	87,28	87,38	87,47
b. Non Bangunan					
Milyar Rp	348,1	369,5	401,0	434,3	463,4
%	13,53	12,83	12,72	12,62	12,53
Total PMTB					
Milyar Rp	2.572,6	2.880,2	3.153,0	3.439,8	3.699,4
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan <sup>13</sup> (%)					
a. Bangunan	6,22	6,39	6,28	6,04	4,83
b. Non Bangunan	4,51	4,12	4,96	5,82	5,23
Total PMTB	5,98	6,07	6,10	6,01	4,88

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Keterangan : \* Angka Diperbaiki  
\*\* Angka Sementara

### 3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk **“persediaan”** berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan

<sup>12</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

<sup>13</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 13.  
Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Trenggalek  
2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	25,6	16,5	16,7	18,5	19,0
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	17,0	10,0	10,1	10,2	10,3
Proporsi terhadap PDRB ADHB	0,19	0,11	0,10	0,11	0,10

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek  
Keterangan : \* Angka Diperbaiki  
\*\* Angka Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2015 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 25,64 miliar rupiah. Pada tahun 2016 perubahan inventori mencapai nilai tertinggi yaitu lebih dari 25 miliar rupiah, namun tahun 2017 kembali turun hingga mencapai 16,54 miliar rupiah. Sedangkan tahun 2019 terjadi sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi sebesar 19,04 miliar rupiah.

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Trenggalek mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, proporsi perubahan inventori adalah 0,19 persen, selanjutnya 0,11 persen (2015 dan 2018) dan 0,10 persen (2017 dan 2019). Proporsi perubahan inventori tertinggi terdapat pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,19 persen.

### 3.2.6. Net Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Trenggalek,

tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Trenggalek. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Trenggalek di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Trenggalek terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Komponen net ekspor barang dan jasa menjelaskan adanya transaksi ekspor yang telah dikurangi dengan impor, termasuk didalamnya tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen, pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Trenggalek di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi ekspor impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Trenggalek terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Tabel 14.  
Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Trenggalek  
2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	-910,8	-772,8	-831,4	-1.101,1	-1.327,8
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	-756,8	-608,6	-587,2	-624,9	-607,0
Proporsi terhadap PDRB ADHB	-6,68	-5,18	-5,17	-6,34	-7,16
Pertumbuhan <sup>14</sup>	-	-	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Keterangan : \* Angka Diperbaiki  
\*\* Angka Sementara

Secara total, dalam kurun waktu 2015 - 2019 nilai net ekspor barang dan jasa menunjukkan hal yang kurang menggembirakan. Pada tahun 2015 nilai net ekspor barang dan jasa sebesar -910,8 milyar rupiah, meningkat menjadi sebesar -772,8 milyar rupiah pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 - 2019 nilai net ekspor barang dan jasa menunjukkan penurunan hingga mencapai -1,3 trilyun rupiah. Adanya tanda minus dalam net ekspor berarti Trenggalek sangat bergantung pada barang dan jasa dari luar Trenggalek untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Trenggalek.

Nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 menunjukan arah yang fluktuatif dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar -0,76 trilyun rupiah (2015); -0,61 trilyun rupiah (2016); -0,59 trilyun rupiah (2017) dan -0,62 trilyun rupiah (2018) serta -0,61 trilyun rupiah (2019). Sementara itu, pada periode 2015 s.d 2019, proporsinya dalam PDRB juga berfluktuatif dari -6,68 persen pada tahun 2015 menjadi -7,16 persen di tahun 2019.

<sup>14</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

## **BAB IV**

### **PERKEMBANGAN AGREGAT**

#### **PDRB PENGELUARAN**

#### **KABUPATEN TRENGGALEK**

**2015 - 2019**

<https://trenggalek.bps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

#### 4.1. PDRB (Nominal)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Trenggalek di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

Tabel 16.  
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek  
2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
a. ADHB	13.634,8	14.915,8	16.081,7	17.354,5	18.553,2
b. ADHK 2010	10.501,6	11.026,5	11.579,9	12.161,9	12.779,5
PDRB Perkapita (Juta Rp)					
a. ADHB	19,78	21,58	23,20	24,97	26,65
b. ADHK 2010	15,24	15,95	16,71	17,50	18,35
Pertumbuhan (%)					
a. PDRB	5,03	5,00	5,02	5,03	5,08
b. PDRB Perkapita	4,66	4,68	4,74	4,75	4,87
c. Penduduk	0,35	0,30	0,26	0,26	0,20
Jumlah Penduduk	689.200	691.295	693.104	694.902	696.295

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Keterangan : \* Angka Diperbaiki

\*\* Angka Sementara

Pada periode 2015 - 2019 nominal PDRB Kabupaten Trenggalek atas dasar harga berlaku meningkat cukup signifikan, dari sebesar 13,63 trilyun rupiah tahun 2015 menjadi 18,55 trilyun rupiah tahun 2019. Pada periode yang sama nominal PDRB atas dasar harga konstan juga meningkat dari sebesar 10,50 trilyun rupiah tahun 2015 menjadi 12,78 trilyun rupiah tahun 2019 dengan pertumbuhan 5,08 persen pada tahun 2019.

## 4.2. Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 17.  
Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Trenggalek  
2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir ADHB (Miliar Rp)	11.947,4	12.791,8	13.743,4	14.997,4	16.162,5
a. Rumah tangga	9.675,7	10.509,6	11.311,8	12.309,6	13.286,0
b. LNPRT	558,1	618,7	653,7	719,2	753,9
c. Pemerintah	1.713,7	1.663,5	1.777,9	1.968,6	2.122,6
PDRB ADHB (Miliar Rp)	13.634,8	14.915,8	16.081,7	17.354,5	18.553,2
Proporsi (%)	87,62	85,76	85,46	86,42	87,11
Proporsi Konsumsi Akhir ADHB (Persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
a. Rumah tangga	80,99	82,16	82,31	82,08	82,20
b. LNPRT	4,67	4,84	4,76	4,80	4,66
c. Pemerintah	14,34	13,00	12,94	13,13	13,13

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Keterangan : \* Angka Diperbaiki

\*\* Angka Sementara

Kontribusi total konsumsi akhir dalam perekonomian Trenggalek tahun 2015 sebesar 11,95 trilyun rupiah atau sebesar 87,63 persen. Angka ini terus berfluktuasi hingga mencapai 85,46 persen tahun 2017 dan kemudian meningkat 87,11 persen tahun 2019.

Komponen pengeluaran rumah tangga memegang peranan paling besar dalam konsumsi akhir tersebut dengan kontribusi lebih dari 80 persen periode 2015 – 2019 dari seluruh total konsumsi akhir. Pada periode yang sama, komponen pengeluaran konsumsi LNPRT stabil pada kisaran 4 – 5 persen dari keseluruhan konsumsi akhir.

### 4.3. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

”ICOR” merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ”Nilai Tambah”.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak ”K” unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana:

$I_t$	=	PMTB tahun ke t
$Y_t$	=	Output tahun ke t
$Y_{t-1}$	=	Output tahun ke t-1

ICOR Trenggalek dalam kurun waktu 2015 – 2019 berfluktuasi. Tahun 2015 ICOR Trenggalek sebesar 4,06 hingga sebesar 4,13 pada tahun 2019. ICOR yang meningkat memberikan gambaran bahwa kegiatan investasi fisik yang dilakukan kurang efisien, demikian pula sebaliknya. Bila dilakukan perbandingan antara tahun 2018 dan 2019, dimana

tahun 2019 dengan ICOR sebesar 4,13 dan tahun 2018 dengan ICOR sebesar 4,18 menunjukkan investasi fisik tahun 2019 lebih efisien dari pada tahun 2018.

Tabel 18.

*Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Trenggalek,  
2015 – 2019*

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHK 2010 (Miliar Rp)	10.501,6	11.026,5	11.579,9	12.161,9	12.779,5
Perubahan (Miliar Rp)	503,0	525,0	553,3	582,0	617,6
PMTB ADHK 2010	2.040,2	2.164,1	2.296,0	2.434,0	2.552,7
ICOR	4,06	4,12	4,15	4,18	4,13

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Keterangan : \* Angka Diperbaiki

\*\* Angka Sementara

**BAB V**  
**PENUTUP**

<https://trenggalek.kab.bps.go.id>

- ❖ PDRB menurut pengeluaran tahun 2015 s.d 2019 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Trenggalek pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
- ❖ Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
- ❖ Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2015 s.d 2019, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
- ❖ Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
- ❖ Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Trenggalek terhadap ekonomi luar daerah.

## LAMPIRAN

<https://trenggalekkab.bps.go.id>

## Lampiran 1

(Seri 2010)  
PDRB Kabupaten Trenggalek Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah),  
2015 – 2019

Komponen Pengeluaran		2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9.675.667,0	10.509.634,7	11.311.808,2	12.309.556,7	13.285.972,4
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	558.054,0	618.709,0	653.677,2	719.214,0	753.933,2
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.713.657,8	1.663.498,7	1.777.867,5	1.968.646,1	2.122.614,8
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2.572.583,1	2.880.240,3	3.152.981,3	3.439.773,6	3.699.379,3
5	Perubahan Inventori	25.636,9	16.539,4	16.707,1	18.490,5	19.044,1
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-910.846,0	-772.806,7	-831.386,7	-1.101.144,2	-1.327.752,1
7	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	13.634.752,8	14.915.815,5	16.081.654,5	17.354.536,7	18.553.191,7

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek  
Keterangan : \* Angka Diperbaiki  
\*\* Angka Sementara

## Lampiran 2

(Seri 2010)

### PDRB Kabupaten Trenggalek Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2015 – 2019

Komponen Pengeluaran		2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7.652.245,8	7.988.241,0	8.352.940,7	8.753.494,3	9.171.682,3
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	384.566,7	407.403,1	417.542,8	445.718,2	456.163,5
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.164.395,2	1.065.428,3	1.090.534,8	1.143.440,2	1.195.583,6
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2.040.170,7	2.164.074,7	2.295.990,9	2.433.950,8	2.552.738,4
5	Perubahan Inventori	16.989,9	9.991,6	10.068,6	10.196,6	10.313,2
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-756.791,1	-608.589,5	-587.219,7	-624.942,0	-607.026,0
7	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	10.501.577,2	11.026.549,1	11.579.858,1	12.161.858,1	12.779.455,0

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Keterangan : \* Angka Diperbaiki

\*\* Angka Sementara

### Lampiran 3

(Seri 2010)

#### Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Trenggalek Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Persen), 2015 – 2019

Komponen Pengeluaran		2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,23	4,39	4,57	4,80	4,78
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,12	5,94	2,49	6,75	2,34
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,60	-8,50	2,36	4,85	4,56
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	5,98	6,07	6,10	6,01	4,88
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
7	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,03	5,00	5,02	5,03	5,08

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Keterangan : \* Angka Diperbaiki  
\*\* Angka Sementara

## Lampiran 4

(Seri 2010)

### Distribusi PDRB Kabupaten Trenggalek Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2015 – 2019

Komponen Pengeluaran		2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	70,96	70,46	70,34	70,93	71,61
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,09	4,15	4,06	4,14	4,06
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,57	11,15	11,06	11,34	11,44
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	18,87	19,31	19,61	19,82	19,94
5	Perubahan Inventori	0,19	0,11	0,10	0,11	0,10
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-6,68	-5,18	-5,17	-6,34	-7,16
7	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Keterangan : \* Angka Diperbaiki  
\*\* Angka Sementara

## Lampiran 5

(Seri 2010)  
**Laju Implisit PDRB Kabupaten Trenggalek  
 Menurut Pengeluaran (Persen),  
 2015 – 2019**

Komponen Pengeluaran		2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,72	4,05	2,93	3,84	3,01
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,42	4,65	3,09	3,07	2,43
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,00	6,09	4,41	5,61	3,12
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4,31	5,55	3,18	2,91	2,54
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
7	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,57	4,19	2,66	2,75	1,74

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Keterangan : \* Angka Diperbaiki  
 \*\* Angka Sementara

## DAFTAR PUSTAKA

<https://trenggalekkab.bps.go.id>

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. \_\_\_\_\_, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. \_\_\_\_\_ *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. \_\_\_\_\_, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. \_\_\_\_\_, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. \_\_\_\_\_, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

# DATA MENCERDASKAN BANGSA



*Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Trenggalek*



*Jl. Brigjen Soetran Trenggalek*



*0355-791432*



*bps3503@bps.go.id*